

LAPORAN THESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI MAHASISWA *CO-ASSISTANT* KEDOKTERAN GIGI DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO, KOTA
SEMARANG**



Rahmania Alikhlah

NIM 21.C2.0075

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum adanya kepastian hukum bagi mahasiswa pendidikan profesi kedokteran gigi (*Co-Assistant*). Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran disebutkan bahwa dokter gigi dapat memberikan pelimpahan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi kepada tenaga kesehatan lainnya, mahasiswa co-ass meskipun terlibat dalam kegiatan klinis sebagai bagian dari kurikulum, tidak dapat secara formal dikategorikan sebagai tenaga kesehatan dan belum memiliki izin praktik resmi, sehingga mereka berada dalam posisi yang rentan terhadap pelanggaran hukum. Ketidakelasan posisi hukum mereka merugikan dan menempatkan mereka pada risiko tinggi.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) bagaimana pengaturan terkait kedudukan hukum mahasiswa *Co-Assistant* kedokteran gigi? 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan Pelindungan hukum terhadap tindakan medis yang dilaksanakan oleh mahasiswa *Co-Assistant* kedokteran gigi di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Kota Semarang? 3) Bagaimana Efektivitas Regulasi Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam sengketa medis, pertanggungjawabannya melibatkan mahasiswa co-assistant, institusi pendidikan, dan dokter penanggung jawab. Dokter penanggung jawab, sebagai pemegang izin praktik, memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan medis dan dapat dikenakan sanksi jika memberikan pelimpahan wewenang yang tidak sesuai. Efektivitas regulasi hukum dalam pendidikan profesi kedokteran gigi dipengaruhi oleh kompetensi penegak hukum, fasilitas, kesadaran hukum, dan budaya hukum, seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto. Penelitian menemukan bahwa faktor-faktor ini belum sepenuhnya diimplementasikan, sehingga menciptakan ketidakjelasan dalam kriteria kelalaian mahasiswa. Diperlukan pengembangan standar pelayanan kedokteran untuk memastikan kepastian hukum, kualitas pendidikan, dan profesionalisme.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelindungan Hukum, Mahasiswa *Co-Assistant* Kedokteran Gigi,

ABSTRACT

This research is motivated by the absence of legal certainty for dental professional education students (Co-Assistant). In accordance with Article 23 paragraph 1 of the Regulation of the Minister of Health Number 2052 of 2011 concerning Practice Permits and Implementation of Medical Practices, it is stated that dentists can delegate acts of medicine or dentistry to other health workers, co-ass students, although involved in clinical activities as part of the curriculum, cannot be formally categorized as health workers and do not yet have an official practice license, so they are in a vulnerable position to violations of the law. The uncertainty of their legal position is detrimental and puts them at high risk.

The formulation of this research problem are: 1) how is the regulation related to the legal position of dental Co-Assistant students? 2)How is the form of responsibility and legal protection for medical actions carried out by dental Co-Assistant students at Diponegoro National Hospital, Semarang City? 3)How is the Effectiveness of Dentistry Professional Education Regulations?

This research uses descriptive analytical method, with empirical juridical approach. The results of this study conclude that in medical disputes, the responsibility involves co-assistant students, educational institutions, and the doctor in charge. The doctor in charge, as the holder of the license to practice, has an important role in medical decision-making and can be sanctioned if he/she provides inappropriate delegation of authority. The effectiveness of legal regulation in dental professional education is influenced by law enforcement competence, facilities, legal awareness, and legal culture, as described by Soerjono Soekanto. The study found that these factors have not been fully implemented, thus creating uncertainty in the criteria for student negligence. The development of medical service standards is needed to ensure legal certainty, education quality, and professionalism.

Keywords: Liability, Legal Protection, Dentistry Co-Assistant Students,